
Pembangunan Desa Berbasis Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

^{1*}Adhi Surya, ²Sulastini, ³Syahrial Shaddiq

^{1,2}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia

³Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

adhisuryastmt@gmail.com

(Disubmit: 1 Juni 2024 | Diterima: 19 Juni 2024 | Dipublikasikan: 29 Juni 2024)

ABSTRAK

Konsep Indeks Desa Membangun (IDM) sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam regulasi desa sendiri UU No. 6 Tahun 2014 juga telah memberikan sebuah stimulus dan mendukung percepatan agenda pembangunan desa (STIT et al., 2018). Hal yang menjadi titik fokus utamanya adalah masyarakat desa sebagai subjek pertama dan yang mendapatkan suatu perhatian akan adanya kemandirian masyarakat desa. Sehingga dari proses pembentukan masyarakat desa yang mandiri tersebutlah diharapkan akan memberikan implikasi-implikasi yang positif bagi masyarakat desa dan dapat meningkat indeks pembangunan desanya. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini selalu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia. Ini terjadi karena pemerintah telah menyadari pentingnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Kegagalan menyelesaikan masalah ini akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: “(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri”. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini strata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa. Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: “(1) desa sangat tertinggal: < 0,491; (2) desa

tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; dan (5) desa mandiri: $> 0,815$ " (Suroso, 2019). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan sifat yang tepat dari gejala atau tanda-tanda selanjutnya perkembangan hubungan antara objek penelitian dengan fenomena sosial lainnya dalam data diperoleh dengan kajian pustaka, melalui dokumen-dokumen resmi yang mencatat keadaan yang terjadi dalam suatu objek penelitian, berupa majalah, hasil-hasil studi, tesis, maupun hasil survei dari berbagai instansi pemerintah maupun tidak (Novriando & Purnomo, 2020). Studi kasus dalam pendekatan ini diadopsi dari Teorinya Sugiyono (2009) yang mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan salah satu metode kualitatif dengan menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Studi dokumentasi sendiri merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti kualitatif dalam hal untuk memperoleh sudut pandang atau gambaran dari objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sumber data dapat berasal dari dokumen dokumentasi dari website Desa maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal analisis data penulis menggunakan analisis naratif untuk menggambarkan sebuah fenomena dan membedah mengenai inovasi yang dilakukan oleh Desa dalam melaksanakan pembangunan berbasis IDM. Desa di Kecamatan Bati-bati akan menjadi obyek penelitian dari judul penelitian "Studi Pembangunan Desa Berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Kata Kunci: Pembangunan Desa dan IDM Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

ABSTRACT

The concept of the Village Development Index (IDM) itself is then explained in the Ministry of Villages Regulation (Permendes) No. 2 of 2016 concerning village development patterns and maps. In article 3 it is stated that the IDM concept is integrated from several categories within it which include: Economic Resilience Index (IKE), Environmental Resilience Index (IKL), and Social Resilience Index (IKS). These three factors are then used as references in the process of measuring the strata of independence and progress of a village. The indicator set developed in the Developing Village Index was developed based on the concept that in order to achieve a developed and independent village, a sustainable development framework is needed in which social, economic and ecological aspects are forces that complement each other and maintain the potential and ability of the village to improve village life. Village community development and empowerment policies and activities must produce equality and justice, be based on and strengthen local and cultural values, and be environmentally friendly by managing natural resource potential well and sustainably. In this context, social, economic and ecological resilience work as dimensions that strengthen the process and achieve the goals of development and empowerment of village communities. In the village regulations themselves, Law no. 6 of 2014 has also provided a stimulus and supported the acceleration of the village development agenda (STIT et al., 2018). The main focus point is the village community as the first subject and what gets attention is the independence of the village community. So it is hoped that the process of forming an independent village community will provide positive implications for the village community and can increase the village development index. The Village Development Index captures the development of village independence based on the implementation of the Village Law with the

support of Village Funds and Village Assistants. The Developing Village Index directs the appropriateness of intervention in policy by correlating appropriate development intervention from the Government in accordance with community participation which correlates with the characteristics of the village area, namely typology and social capital. To reduce the number of underdeveloped villages and increase the number of independent villages, an important problem that needs to be resolved is poverty. Poverty here always gets more attention from the Indonesian government. This happens because the government has realized the importance of solving the problem of poverty. Failure to resolve this problem will result in the emergence of various social, economic and political problems in society. In the context of village typology, the Developing Village Index classifies villages into five (5) statuses, namely: "(i) Very Disadvantaged Villages; (ii) Disadvantaged Villages; (iii) Developing Village; (iv) Advanced Village; and (v) Independent Village". From these five classifications, village statistics now have several divisions which are used as village indicators or parameters. The typology for dividing the Developing Village Index (IDM) can be divided into several things such as: "(1) very underdeveloped villages: < 0.491 ; (2) underdeveloped villages: > 0.491 and < 0.599 ; (3) developing villages: > 0.599 and < 0.707 ; (4) developed villages: > 0.707 and < 0.815 ; and (5) independent villages: > 0.815 " (Suroso, 2019). This research uses qualitative analysis with descriptive research methods. Research is carried out to describe the exact nature of symptoms or signs and the subsequent development of the relationship between the research object and other social phenomena in data obtained by literature review, through official documents that record the conditions that occur in a research object, in the form of magazines, results. results of studies, theses, and survey results from various government agencies or not (Novriando & Purnomo, 2020). The case study in this approach is adopted from Sugiyono's theory (2009) which says that documentation study is a qualitative method by analyzing documents created by the subject himself or others. Documentation study itself is a method used by qualitative researchers to obtain a point of view or description of the object to be studied. The data collection technique in this research uses documentation techniques by collecting data using various documents or notes that record the state of the research concept in the unit of analysis which is used as the research object. Data sources can come from documentation documents from the Village website or the results of previous research. In terms of data analysis, the author uses narrative analysis to describe a phenomenon and dissect the innovations carried out by the Village in implementing IDM-based development. Villages in Bati-bati District will be the research object of the research title "Village Development Study Based on IDM (Development Village Index) in Bati-Bati District, Tanah Laut Regency.

Keywords: Village Development and IDM, Bati-Bati District, Tanah Laut Regency.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan seluruh rangkaian usaha yang dilakukan di lingkungan desa yang memiliki tujuan utama untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, dan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat desa dengan perencanaan yang dibuat atas dasar musyawarah di kalangan masyarakat desa seperti juga ciri-ciri ekonomi konvensional. Pembangunan desa menjadi sebuah hal yang penting karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi negara.

Desa sebagai struktur terkecil dalam pemerintahan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rangka membangun perekonomian negeri yang kuat. Desa yang berada di Kecamatan Bati-bati dapat dilihat status desa melalui IDM.

Tabel 1. IDM Kecamatan Bati-Bati

KODE	NAMA KECAMATAN	KODE	NAMA DESA
630105	BATI BATI	6301052001	BENUA RAYA
630105	BATI BATI	6301052002	BATI-BATI
630105	BATI BATI	6301052003	UJUNG
630105	BATI BATI	6301052004	LIANG ANGGANG
630105	BATI BATI	6301052005	BENTOK KAMPUNG
630105	BATI BATI	6301052006	BENTOK DARAT
630105	BATI BATI	6301052007	BANYU IRANG
630105	BATI BATI	6301052008	NUSA INDAH
630105	BATI BATI	6301052009	PANDAHAN
630105	BATI BATI	6301052010	PADANG
630105	BATI BATI	6301052011	UJUNG BARU
630105	BATI BATI	6301052012	SAMBANGAN
630105	BATI BATI	6301052013	KAIT-KAIT
630105	BATI BATI	6301052014	KAIT-KAIT BARU

Sumber : IDM Kecamatan Bati-Bati, 2022

Konsep IDM sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementrian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam regulasi desa sendiri UU No. 6 Tahun 2014 juga telah memberikan sebuah stimulus dan mendukung percepatan agenda pembangunan desa (STIT et al., 2018). Hal yang menjadi titik fokus utamanya adalah masyarakat desa sebagai subjek pertama dan yang mendapatkan suatu perhatian akan adanya kemandirian masyarakat desa. Sehingga dari proses pembentukan masyarakat desa yang mandiri tersebutlah diharapkan akan memberikan implikasi-implikasi yang positif bagi masyarakat desa dan dapat meningkatkan indeks pembangunan desanya. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi

dan modal sosial. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini selalu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia. Ini terjadi karena pemerintah telah menyadari pentingnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Kegagalan menyelesaikan masalah ini akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik di masyarakat.

Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mengukur pembangunan Desa dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kecamatan Bati-Bati?
- 2) Bagaimana melihat tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kecamatan Bati-Bati?
- 3) Bagaimana melihat status Desa (Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kecamatan Bati-Bati?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pembangunan desa. IDM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu desa dalam melakukan pembangunannya. Status desa yang disebut dengan klasifikasi desa berdasarkan IDM ini dijelaskan dalam Permen Desa PDT Trans No 2 Tahun 2016, yang menggolongkan desa ke dalam 5 status, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal.

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

A. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

1. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
2. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
3. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);

4. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016. Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni:

- 1) Desa Mandiri
- 2) Desa Maju
- 3) Desa Berkembang
- 4) Desa Tertinggal
- 5) Desa Sangat Tertinggal

Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Tujuan Indeks Desa Membangun sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa
2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa
3. Menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain

Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Landasan hukum Indeks Desa Membangun. Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
3. Sumber Website resmi IDM Kemendesa PDDT - <https://idm.kemendesa.go.id>

Tabel 2. Jurnal Yang Terkait (10 Tahun Kebelakang)

No	Judul	Jurnal
1.	Setyobakti, M. H. (2017). Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa	WIGA - Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 7(1), 1-14. https://media.neliti.com/media/publications/164427-ID-identifikasi-masalah-dan-potensi-desa-

	Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.	be.pdf
2.	Muhtarom, M., Nurhadi Kusuma, M. P. I., & Eri Purwanti, M. (2018)., Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	DOI: 10.35450/JIP.V6I02.96 Corpus ID: 134029978
3.	Netra Ekawati, Asdi Agustar, Devi Analia (2022). Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)	http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8005 https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8005
4.	Salmah, Fredi Andria, Amelia Rahmi (2022). Klasterisasi Desa Melalui IDM Sebagai Fondasi Dasar Pembangunan Desa Di Kabupaten Bogor.	https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/6809/3657
5.	K. Intan Dwi Fajar, R Rijanta, Andri Kurniawan (2019). Eksplorasi Variabel Pembangunan Berkelanjutan untuk Indeks Desa Membangun Pulau Jawa	https://www.journal.ugm.ac.id/mgi/article/view/73056/35772
6.	Ari Kristin Prasetyoningrum (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	https://www.researchgate.net/journal/Equilibrium-Jurnal-Ekonomi-Syariah-2355-0228
7.	Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, Een N. Walewangko (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara	https://doi.org/10.35794/jpekd.14203.18.3.2016

8.	Agus Nyoman Astika (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	https://www.researchgate.net/journal/Jurnal-Ilmiah-Muqoddimah-Jurnal-Ilmu-Sosial-Politik-dan-Hummaniora-2548-5067
9.	Netra Ekawati, Asdi Agustar, Devi Analia (2022). Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)	https://jkp.ejournal.unri.ac.id/
10.	Eka Setyowati (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang	https://www.neliti.com/publications/433744/tata-kelola-pemerintahan-des-a-pada-perbedaan-indeks-des-a-membangun-idm-studi-tig

Sumber : Disarikan dari Jurnal Online, 2023

Dalam regulasi desa sendiri UU No. 6 Tahun 2014 juga telah memberikan sebuah stimulus dan mendukung percepatan agenda pembangunan desa (STIT et al., 2018). Hal yang menjadi titik fokus utamanya adalah masyarakat desa sebagai subjek pertama dan yang mendapatkan suatu perhatian akan adanya kemandirian masyarakat desa. Sehingga dari proses pembentukan masyarakat desa yang mandiri tersebutlah diharapkan akan memberikan implikasi-implikasi yang positif bagi masyarakat desa dan dapat meningkatkan indeks pembangunan desanya.

Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini selalu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia. Ini terjadi karena pemerintah telah menyadari pentingnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Kegagalan menyelesaikan masalah ini akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik di masyarakat.

Penguatan kekuasaan perangkat desa dapat memperkuat prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan desa dalam UU Desa. Kewenangan desa sendiri dimaknai meliputi pengelolaan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan kewenangan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa, hak atas asal usul, masyarakat dan adat istiadat. Dalam fokus kekuasaannya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan daerah dalam skala desa, ada tiga hal yang menjadi indikator yaitu prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa akan memperkuat landasan otonomi desa. Dalam kerangka pemahaman ini, dikembangkan metode "Membangun Indeks Desa". IDM meyakini pentingnya inisiatif dan kekuatan masyarakat pedesaan dalam proses kemajuan dan pemberdayaan kehidupan pedesaan dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi (KEMENDES RI, 2015).

Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No. 6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa. **Pertama** adalah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Karakteristik desa ini memiliki beberapa konsep dalam pembangunannya seperti: pertama pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan dan kedua pengembangan sarana pembangunan terhadap aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan kegiatan baik itu produksi, distribusi, dan pemasaran. Selain itu untuk mendukung pengelolaan perekonomian desa pembentukan usaha ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui

pengelolaan BUMDes sebagai aset yang dimiliki oleh desa. **Kedua** adalah desa berkembang yang memiliki beberapa karakteristik meliputi: pembangunan serta pengembangan seluruh infrastruktur perekonomian mulai dari produksi, retribusi, dan pemasaran serta berusaha untuk dapat menjadi lumbung pangan dan usaha perekonomian masyarakat desa. Dalam hal pemeliharaan infrastruktur desa desa berkembang berusaha untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa hingga dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat desa. Untuk mendorong hal tersebut penguatan perekonomian desa didukung oleh BUMDes sebagai akses perekonomian mulai dari pemberian modal, pengelolaan usaha, proses distribusi, dan terakhir proses pemasaran yang kesemuanya dipandu oleh pemerintah desa dalam rangka membantu perekonomian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. **Ketiga** adalah desa maju atau desa mandiri yang dicirikan sebagai sebuah desa yang memiliki baik itu pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur desa yang berbasis pada angka produktivitas yang difokuskan dalam sebuah produk unggulan. Proses pemberdayaan dan pemeliharaan infrastruktur didukung atas proses pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan ketahanan pangan bagi masyarakat desa. Pengelolaan aset desa didukung oleh produktivitas dari BUMDes yang berusaha untuk dapat melakukan suatu produksi, retribusi, dan pemasaran yang baik dan didukung oleh kualitas masyarakat desa dengan tujuan sebagai mata pencarian dan pengaktifan perekonomian masyarakat sekitar.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan sifat yang tepat dari gejala atau tanda-tanda selanjutnya perkembangan hubungan antara objek penelitian dengan fenomena sosial lainnya dalam data diperoleh dengan kajian pustaka, melalui dokumen-dokumen resmi yang mencatat keadaan yang terjadi dalam suatu objek penelitian, berupa majalah, hasil-hasil studi, tesis, maupun hasil survei dari berbagai instansi pemerintah maupun tidak (Novriando & Purnomo, 2020).

Studi kasus dalam pendekatan ini diadopsi dari Teorinya Sugiyono (2009) yang mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan salah satu metode kualitatif dengan menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Studi dokumentasi sendiri merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti kualitatif dalam hal untuk memperoleh sudut pandang atau gambaran dari objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sumber data dapat berasal dari dokumen dokumentasi dari website Desa maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal analisis data penulis menggunakan analisis naratif untuk menggambarkan sebuah fenomena dan membedah mengenai inovasi yang dilakukan oleh Desa dalam melaksanakan pembangunan berbasis IDM.

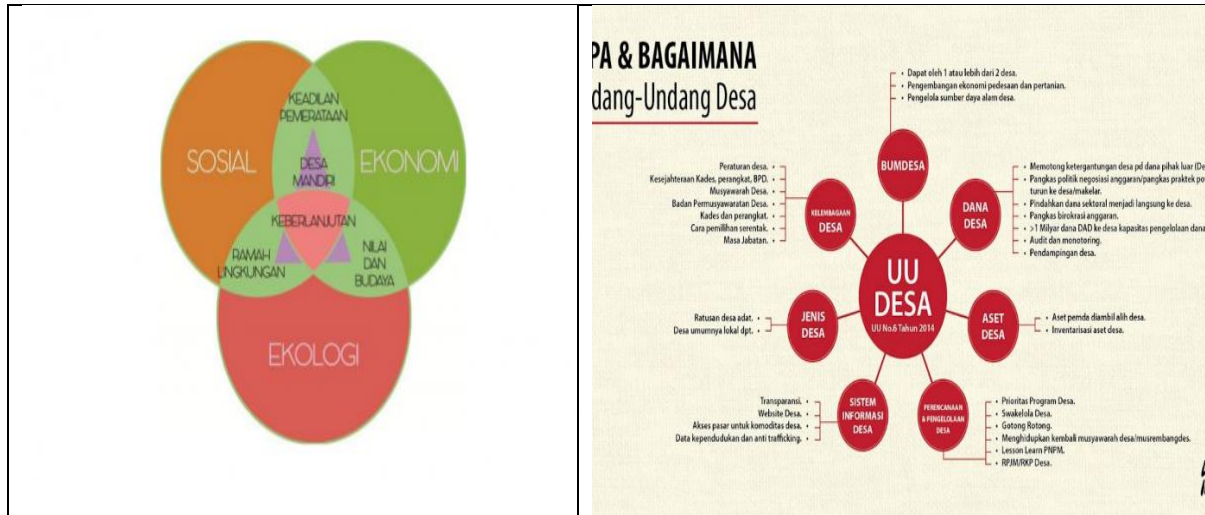
Indikator Desa Membangun. Dalam indikator desa membangun setidaknya ada tiga dimensi yang dijelaskan di dalam Buku Indeks Desa Membangun Kemendes. Berikut disampaikan ketiga dimensi dalam Indikator Desa Membangun.

No.	Dimensi	Variabel
1.	Ketahanan Sosial	Modal Sosial
		Kesehatan
		Pendidikan
		Pemukiman
2.	Ketahanan Ekologi	Kualitas lingkungan
		Potensi rawan bencana
		Tanggap bencana
		Keragaman produksi masyarakat desa
3.	Ketahanan Ekonomi	Tersedianya Pusat perdagangan
		Akses distribusi dan logistic
		Akses ke lembaga keuangan
		Lembaga Ekonomi Keterbukaan wilayah

Sumber : Buku Indeks Desa Membangun Kemendes, 2023.

Indeks Desa Membangun (IDM) bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

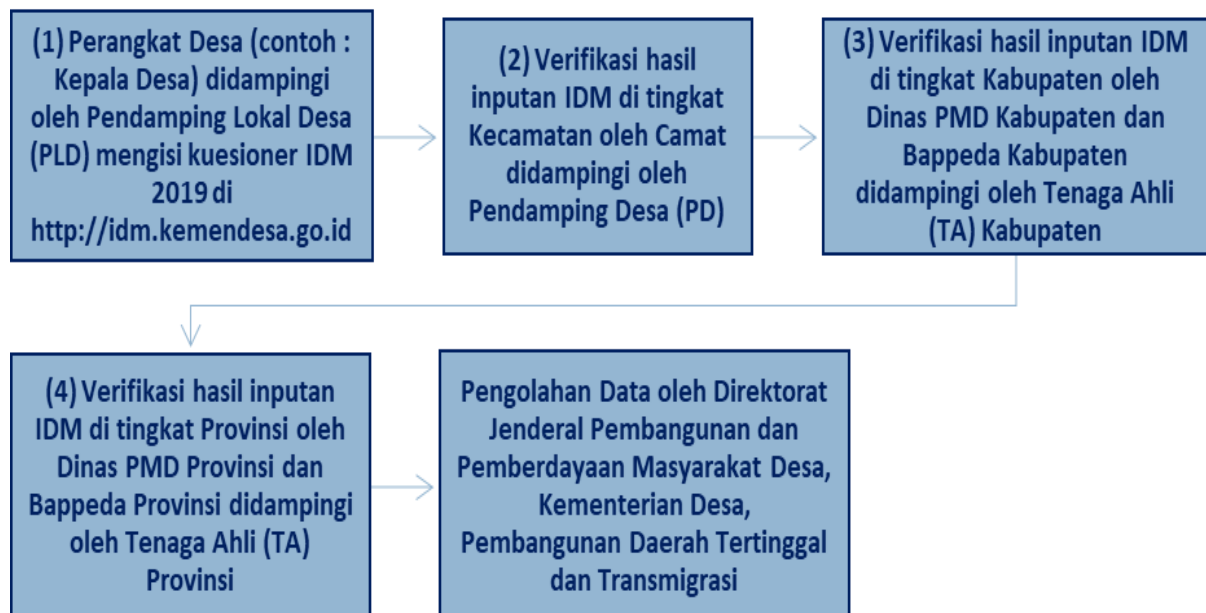




Gambar 1. Diagram IDM dan UU Desa

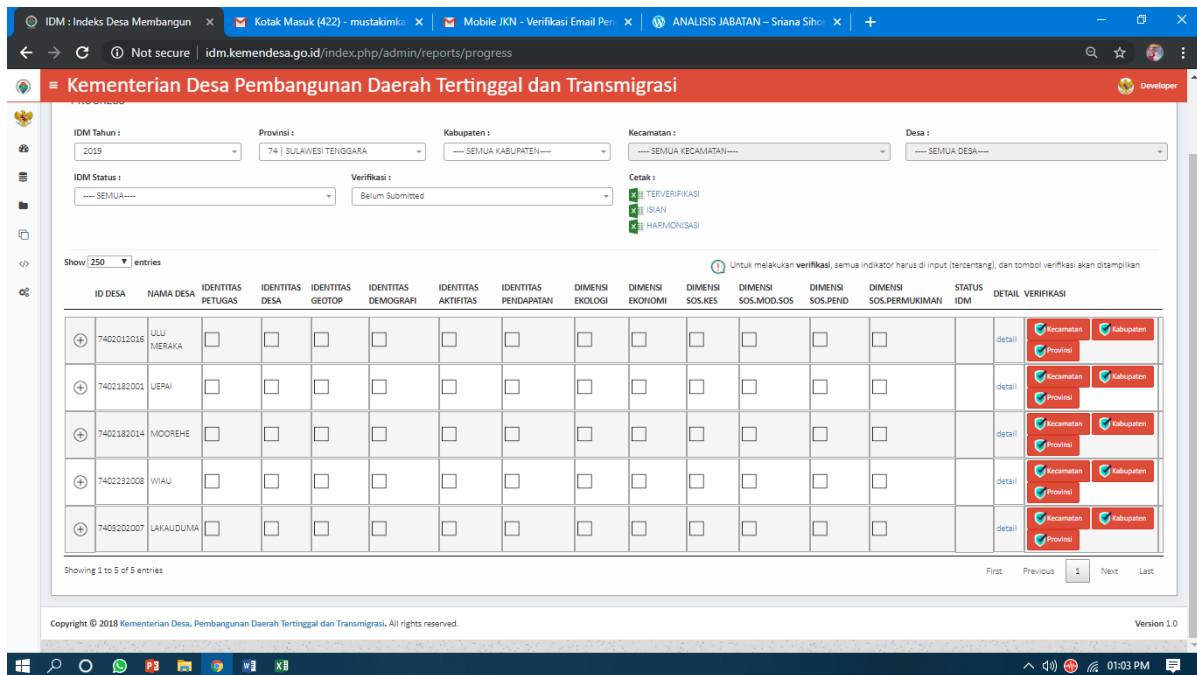
(Sumber: Diagram IDM dan UU Desa, Online, 2023)

Obyek penelitian ini adalah Kecamatan Bati-bati dimana data sekunder diambil dari website: <https://idm.kemendesa.go.id/>. Data yang digunakan adalah data IDM Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022. Bati-bati adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Jarak dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan/Banjarmasin sekitar 41 km. Populasi Total 42,290 jiwa (2.015) jiwa, Luas wilayah 234,75 km². Ada Desa totalnya 14 desa sebagai berikut : (1) Banyu Irang (2) Bati-Bati (3) Bentok Darat (4) Bentok Kampung (5) Benua Raya (6) Kait-Kait (7) Kait-Kait Baru (8) Liang Anggang (9) Nusa Indah (10) Padang (11) Pandahan (12) Sambangan (13) Ujung dan (14) Ujung Baru.



Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan IDM

(Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/6/faq>, 2023)



Gambar 3. Skor IKE, IKL, dan IKS pada Tabel Dashboard Status Desa
(Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/6/faq>, 2023)

HASIL PENELITIAN

Mengukur pembangunan desa dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) di kecamatan Bati-bati. Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa. Konsep IDM sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementrian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disarikan dari data IDM Kecamatan Bati-bati Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

1.	Benua Raya	0.8571	0.7167	0.8
2.	Bati- Bati	0.8457	0.7167	0.6
3.	Ujung	0.8457	0.6	0.6667
4.	Liang Anggang	0.8229	0.5667	0.7333
5.	Bentok Kampung	0.9029	0.7167	0.5333
6.	Bentok Darat	0.8514	0.6833	0.6667
7.	Banyu Irang	0.9029	0.6833	0.6667
8.	Nusa Indah	0.8	0.7333	0.6
9.	Pandahan	0.7486	0.6333	0.7333
10.	Padang	0.9486	0.8167	0.7333
11.	Ujung Baru	0.8	0.6167	0.6667
12.	Sambangan	0.6686	0.6667	0.6667
13.	Kait-kait	0.8457	0.5167	0.8
14.	Kait-kait Baru	0.8286	0.7833	0.8667

Sumber : Analisis IDM Kecamatan Bati-bati Tahun 2022, disarikan 2023.

Melihat tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kecamatan Bati-Bati. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Dimensi Sosial dilengkapi dengan data pada bagian kesehatan yang terdiri dari data ketersediaan sarana kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, apotik, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan tenaga kesehatan dokter, ketersediaan tenaga kesehatan lainnya, akses ke poskesdes/ polindes dan posyandu, tingkat kepesertaan BPJS/JKN/KIS, derajat kesehatan dan gizi buruk, sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), pengukuran tikar pertumbuhan usia anak 0-23 bulan, dan kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi 1000 HPK. Pada bagian pendidikan, dilengkapi dengan data terkait akses ke pendidikan dasar dan menengah, data tingkat pendidikan, akses ke pendidikan non-formal usia 3-5 tahun, dan akses pengetahuan, modal sosial, keamanan warga, kesejahteraan sosial. Pada bagian permukiman, dilengkapi dengan data terkait akses air bersih dan air minum, akses sanitasi, akses listrik, dan akses informasi & komunikasi. Dari tabel IKS diatas terlihat di 14 Desa diatas 0.5 artinya baik dengan rata-rata 0.8334. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Dimensi Ekonomi dilengkapi dengan data terkait keragaman produksi masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi / logistik, akses Lembaga keuangan, ketersediaan Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Dari tabel IKE dari 14 Desa rata-rata 0.675 di atas 0.5 artinya sedang atau baik. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Dimensi Ekologi dilengkapi dengan data terkait kondisi lingkungan dan potensi bencana. Dari tabel IKL dari 14 Desa rata-rata 0.695 di atas 0.5 artinya sedang atau baik.

Melihat status Desa (Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kecamatan Bati-Bati. Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: “(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri”. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrta desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa. Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: “(1) desa sangat tertinggal: $< 0,491$; (2) desa tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; dan (5) desa mandiri: $> 0,815$ ” (Suroso, 2019). Dilihat dari Tabel Analisis IDM sebagai berikut:

No.	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
1.	Benua Raya	0.8571	0.7167	0.8000	0.7913	MAJU
2.	Bati- Bati	0.8457	0.7167	0.6000	0.7208	MAJU
3.	Ujung	0.8457	0.6000	0.6667	0.7041	BERKEMBANG
4.	Liang Anggang	0.8229	0.5667	0.7333	0.7076	MAJU
5.	Bentok Kampung	0.9029	0.7167	0.5333	0.7176	MAJU
6.	Bentok Darat	0.8514	0.6833	0.6667	0.7338	MAJU
7.	Banyu Irang	0.9029	0.6833	0.6667	0.7510	MAJU
8.	Nusa Indah	0.8000	0.7333	0.6000	0.7111	MAJU
9.	Pandahan	0.7486	0.6333	0.7333	0.7051	MAJU
10.	Padang	0.9486	0.8167	0.7333	0.8329	MANDIRI
11.	Ujung Baru	0.8000	0.6167	0.6667	0.6944	BERKEMBANG
12.	Sambangan	0.6686	0.6667	0.6667	0.6673	BERKEMBANG
13.	Kait-kait	0.8457	0.5167	0.8000	0.7208	MAJU
14.	Kait-kait Baru	0.8286	0.7833	0.8667	0.8262	MANDIRI

Sumber : Analisis IDM Kecamatan Bati-bati TA. 2022, disarikan 2023.

Dukungan studi penelitian IDM dengan penulis dan judul berkaitan dengan IDM sebagai berikut yaitu: Setyobakti, M. H. (2017) dengan judul Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Muhtarom, M., Nurhadi Kusuma, M. P. I., & Eri Purwanti, M. (2018) dengan judul Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Netra Ekawati, Asdi Agustar, Devi Analia (2022) dengan judul Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM), Salmah, Fredi Andria, Amelia Rahmi (2022) dengan judul Klasterisasi Desa Melalui IDM Sebagai Fondasi Dasar Pembangunan Desa Di Kabupaten Bogor, K. Intan Dwi Fajar, R Rijanta, Andri Kurniawan (2019) dengan judul Eksplorasi Variabel Pembangunan Berkelanjutan untuk Indeks Desa Membangun Pulau Jawa, Ari Kristin Prasetyoningrum (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia, Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, Een N. Walewangko (2021) dengan judul Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Agus Nyoman Astika (2021) dengan judul Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Netra Ekawati, Asdi Agustar, Devi Analia (2022) dengan judul Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa

Membangun (IDM) dan Eka Setyowati (2019) dengan judul *Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang*. Menyimpulkan bahwa IDM merupakan alat yang mampu mengukur keberhasilan desa dengan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL). Dari Hasil penelitian sebelum dan yang akan datang akan terus memperbaiki dan menambah kuesioner dengan item pertanyaan sebanyak 600 pertanyaan yang mewakili IKS, IKE dan IKL untuk data tahun 2022.

KESIMPULAN

Mengukur pembangunan desa dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) di kecamatan Bati-bati. Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa. Konsep IDM sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementrian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS).

Melihat tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kecamatan Bati-Bati. Dari tabel IKS diatas terlihat di 14 Desa diatas 0.5 artinya baik dengan rata-rata 0.8334. Tabel IKE dari 14 Desa rata-rata 0.675 di atas 0.5 artinya sedang atau baik. Dan Tabel IKL dari 14 Desa rata-rata 0.695 di atas 0.5 artinya sedang atau baik.

Melihat status Desa (Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan metode IDM (Indeks Desa Membangun) Di Kecamatan Bati-Bati. Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: “(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri”. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrta desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa. Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: “(1) desa sangat tertinggal: < 0,491; (2) desa tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) desa berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) desa maju: > 0,707 dan < 0,815; dan (5) desa mandiri: > 0,815”. Desa Benua Raya status desa maju, Bati-bati status desa maju, Ujung status desa berkembang, Liang Anggang status desa maju, Bentok Kampung status desa maju, Bentok Darat status desa maju, Banyu Irang status desa maju, Nusa Indah status desa maju, Pandahan status desa maju, Padang status desa mandiri, Ujung Baru status desa berkembang, Sambangan status desa berkembang, Kait-kait status desa maju dan Kait-kait Baru dengan status desa mandiri.

Saran kedepannya agar bisa dilanjutkan penelitian ini dengan membandingkan dengan data dan analisis IDM 2023 akan terlihat kenaikan angka dan status desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Setyobakti, M. H. (2017). Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis Indek Desa Membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir Kabupaten Malang.

- Muhtarom, M., Nurhadi Kusuma, M. P. I., & Eri Purwanti, M. (2018)., Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
- Netra Ekawati, Asdi Agustar, Devi Analia (2022). Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).
- Salmah, Fredi Andria, Amelia Rahmi (2022). Klasterisasi Desa Melalui Idm Sebagai Fondasi Dasar Pembangunan Desa Di Kabupaten Bogor.
- K. Intan Dwi Fajar, R Rijanta, Andri Kurniawan (2019). Eksplorasi Variabel Pembangunan Berkelanjutan untuk Indeks DesaMembangun Pulau Jawa.
- Ari Kristin Prasetyoningrum (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia
- Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, Een N. Walewangko (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Agus Nyoman Astika (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun.
- Netra Ekawati,Asdi Agustar, Devi Analia (2022).Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).
- Eka Setyowati (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang.